

PENGAWASAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2020

By KHAERATUL UMMAH

**PENGAWASAN⁵ DINAS SOSIAL PROVINSI NTB DALAM
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
TERLANTAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2020**

**Supervision Of The Social Service Of Province NTB In⁷⁹ The
Implementation Of Social Rehabilitation For Neglected Children In
The City Of Mataram In 2020**

SKRIPSI

**³
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



Disusun Oleh:

KHAERATUL UMMAH

218130055

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021-2022**

BAB I

¹⁶ PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga perlu peningkatan pembangunan dengan tujuan menopang kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam ²⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat bahwa tujuan Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk memajukan kepentingan umum, ²⁷ mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Kedamaian abadi dan kedamaian untuk berpartisipasi dalam keadilan sosial. ⁷ Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara wajib memelihara anak-anak miskin dan terlantar”. Artinya, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merawat anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

¹² Berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ¹² 1945, Kesejahteraan Sosial merupakan judul khusus dalam Bab XIV, Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian, ⁹¹ 34 tentang Kepedulian Nasional Terhadap Kelompok Rentan (Anak Miskin dan Diabaikan) dan Sistem Jaminan Sosial. Berisi pasal-pasal, ¹² Dua pasal ini memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, artinya baik buruknya Perekonomian Nasional berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesejahteraan rakyatnya. Ini berarti Kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari sistem ekonomi dan sosial

Indonesia. Artinya Indonesia sebenarnya adalah negara yang menganut konsep “welfare state”. Kami menyediakan agen layanan) dan perawatan. Dalam Negara hukum, Negara tersebut tidak hanya melindungi Hak Asasi Manusia tapi lebih jauh dari itu mengutamakan terjaminnya Hak-Hak Sosial Ekonomi rakyat.

Anak terlantar merupakan anak yang tidak mendapatkan hak sebagai anak dari orangtuanya dan atau orangtuanya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Permasalahan anak terlantar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dapat saling memberikan perhatian dan perlindungan sesama anggota keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memberikan peran penting untuk berkembang anak dalam menentukan masa depan yang akan dipilih, hanya saja banyak stigma masyarakat ekonomi rendah menganggap bahwa pendidikan tidaklah lebih penting dari pekerjaan. Faktor Sosial, Politik Dan Ekonomi

3. Faktor Kelahiran Diluar Nikah

Kelahiran anak yang tidak dikehendaki mayoritas akan ditelantarkan oleh orangtuanya, penelantaran ini dapat berupa pembuangan bahkan penitipan ke sebuah panti asuhan.

Menurut Gunawan dalam Putro, R. D., & Sutarto, J. (2015:129). Balai rehabilitasi social merupakan sebuah lembaga sosial, yang berfungsi:

1. Memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya

2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk membentuk suatu sistem pengendalian sosial (social control), yaitu suatu sistem pemantauan masyarakat terhadap perilaku anggotanya⁴. Peran pemerintah untuk bertanggungjawab memberikan hak anak terlantar tentu sangat diharapkan, bagaimana tindakan pemerintah untuk mengayomi anak terlantar sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak mendapatkan perlindungan merupakan tugas besar yang harus segera diselesaikan.⁴ Hak anak untuk dapat sejahtera telah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam UU No 4 Pasal 2 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :

1. Anak berhak³⁵ untuk dirawat, diasuh dan dibimbing dalam kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsanya agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁴

3. Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah melahirkan.

4. Anak berhak untuk melindungi lingkungan yang secara wajar dapat mempengaruhi atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam

UU tersebut telah dijelaskan hak-hak apa saja yang wajib diberikan untuk memenuhi kesejahteraan anak, begitupun anak terlantar yang sangat membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah. Tidak hanya tercantum dalam UU saja, tetapi kebijakan pemerintah dalam menangani anak terlantar harus lebih diperhatikan, karena jarang sekali anak terlantar mendapatkan perhatian dan program pemerintah yang menyentuh langsung.

Sebagian besar kegiatan anak-anak terlantar di jalanan adalah mengemis dan mengangkat tangan kepada setiap orang yang datang. Lebih buruk lagi, banyak orang berada ¹ di tempat-tempat berbahaya atau mengganggu ketertiban umum, seperti B. lampu lalu lintas, trotoar, dll. Karena anak terabaikan di Mataram pada umumnya adalah pendatang dari pemerintah SeNTB, maka lonjakan anak terabaikan di NTB umumnya disadari oleh masyarakat umum di berbagai bidang masalah ekonomi dan NTB. Ada beberapa penyebab, seperti kekurangan

Aparat sekolah menganggap keberadaan anak jalanan sebagai anak putus sekolah. Oleh karena itu, prinsip tindakan adalah dengan menempatkan anak jalanan di fasilitas pelatihan bagi anak ¹ putus sekolah. Selain itu, layanan ini juga memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk mengikuti pembelajaran paket A, B, C, dan tes kesetaraan. Selain itu, layanan ini juga menyediakan sejumlah besar sumber daya di berbagai disiplin ilmu untuk pelaksanaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kedua, kesejahteraan masyarakat ¹ NTB. Dinas Sosial Kota Mataram tidak memiliki pedoman khusus dalam menangani anak jalanan. Anak jalanan umumnya dianggap sebagai bagian dari anak terlantar, sehingga orang tuanya juga termasuk dalam kategori anak terlantar. Anak-anak

terlantar diperlakukan atas dasar keluarga, komunitas dan institusional. (Sumber: Hasil Penelitian Pusdatin Kemensos, 2011).

Berikut adalah data jumlah anak terlantar yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain :

No	Parameter					OPD
		2018	2019	2020	2021	Sumber Data
1	2	6		7	8	9
II	Data Anak Terlantar	6.635	5.128	5.128	3.886	Dinas Sosial
1	Kota Mataram	540	316	268	239	
2	Lombok Barat	784	621	633	520	
3	Lombok Tengah	1574	1214	1260	910	
4	Lombok Timur	2112	1871	1841	1605	
5	Lombok Utara	300	178	113	65	
6	Sumbawa Barat	85	17	41	21	
7	Sumbawa	205	144	165	135	
8	Dompu	435	89	208	72	
9	Bima	475	365	294	138	
10	Kota Bima	125	313	305	181	

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “ **Pengawasan Dinas Sosial Provinsi NTB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun 2020**’.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Pengawasan Dinas Sosial Provinsi NTB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun 2020 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

Untuk Mengetahui Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Provinsi NTB Dalam Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di kota Mataram

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1.3.1 Manfaat Peraktis

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang rehabilitasi sosial anak terlantar di kota mataram
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak terlantar.

1.3.2 ³ Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait dengan Rehabilitasi Sosial Mengenai Anak Terlantar di Indonesia pada umumnya. Kemudian ³⁶ penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.3.3 Manfaat Akademis

Salah satu persyaratan untuk ³ memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu Ilmu Pemerintahan (S.IP) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan dapat menyempurnakan teori yang digunakan untuk memvalidasi penelitian yang dilakukan. ⁸⁰ Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencari informasi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. ²² Selain itu, penulis juga mencari informasi dari buku-buku, disertasi dan esai untuk mendapatkan judul-judul teori yang dijadikan landasan teori ilmiah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti dan Tahun	Nizar Fickiansyah (2016)
	Judul	⁴⁵ Evaluasi Proses Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender
	⁷² Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan rehabilitasi sosial di Panti Asuhan Klendel Putrautama 1 dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh panti asuhan. Ada

		<p>tujuh fase yang dimulai dengan pendekatan pertama, penerimaan, evaluasi, pembinaan dan bimbingan. Penilaian penulis terhadap delapan metrik tersebut menunjukkan bahwa kualitas keberhasilan dalam tahap rehabilitasi sosial di fasilitas ini adalah baik.</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Keduanya membahas rehabilitasi sosial untuk anak terlantar</p> <p>Selisih : Penelitian ini berfokus pada tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial di panti asuhan dan pelayanan kepada anak terlantar.</p>
	<p>Nama Peneliti dan Tahun</p>	<p>³⁷ Sinabutar, A. M., & Setianingsih, E. L. (2017)</p>
	<p>Judul</p>	<p>Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Di Kota Semarang</p>
	<p>²⁶ Metode Penelitian</p>	<p>Kualitatif</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian program pengobatan tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal, oleh karena itu diperlukan Kerjasama antar instansi terkait.</p>

Persamaan dan Perbedaan	<p>Persamaan: Sama-sama menangani pengasuhan anak terlantar/anak jalanan dengan kesejahteraan sosial</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Studi ini membahas kurangnya kerjasama antara program pengobatan suboptimal dan otoritas.</p>
Nama peneliti dan Tahun	Putro, R. D., & Sutarto, J. (2015)
Judul	Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Dibalai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang
Metode Penelitian	Teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
Hasil Penelitian	<p>Studi ini menunjukkan bahwa pengembangan PGOT secara umum memiliki beberapa fase. Yaitu, pengungkapan dan pemahaman masalah, dan perencanaan program pelayanan.</p> <p>Kendala yang paling mendasar adalah kurangnya fasilitas dan program serta sumber daya manusia yang tidak memadai.</p>
Persamaan dan perbedaan	<p>Persamaan : sama-sama membahas tentang Anak Terlantar</p>

		Perbedaan : Dalam penelitian ini penulis membahas tentang perencanaan program dan pelayanan serta faktor penghambat pelayanan. 24
	Nama Peneliti dan Tahun	Falaq, Y., Rachman, M., & Suyahmo, S. (2016)
	Judul	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking Pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara
	Metode Penelitian 11	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Pelaksanaan program kinerja rehabilitasi sosial meliputi tahapan pendekatan, penilaian, perencanaan kinerja, dan pelaksanaan kinerja, yang dituangkan dalam bentuk pembinaan jasmani dan kesehatan melalui olahraga.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Penelitian ini membahas hal yang sama tentang rehabilitasi sosial anak. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada implementasi, bimbingan, dan keterampilan.
	Nama Peneliti dan Tahun	Widyasari, I. (2016).

Judul	Pusat Rehabilitasi Perlindungan Sosial Remaja (BPRSR) Analisis penerapan model manajemen pelayanan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak di Yogyakarta
Metode	Kualitatif
Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada model manajemen pelayanan khusus yang diterapkan oleh BPRSR Yogyakarta ialah hambatan pada sumber daya manusia serta saran dan prasarana.
Persamaan dan Perbedaan	Persamaan: Dalam penelitian ini, keduanya membahas tentang rehabilitasi sosial bagi anak. Perbedaan: Penelitian ini mendeskripsikan layanan spesifik yang diterapkan oleh BPRSP Yogyakarta, serta model implementasi dan penerapan yang diadopsi.

Pertama, Nizar Fickiansyah (2016) melakukan “Evaluasi Proses 1 Ptolautama 1 Tahap Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Panti Asuhan Klendel”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial di Panti Asuhan Anak Ptolautama 1 Klendel dilakukan sesuai standar yang

ditetapkan oleh panti asuhan. Ada tujuh fase yang dimulai dengan pendekatan pertama, penerimaan, evaluasi, pembinaan dan bimbingan, distribusi, bimbingan lebih lanjut dan penghentian. Dari hasil penilaian yang dilakukan, penulis dapat menggunakan delapan metrik untuk memaknai bahwa kualitas keberhasilan dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial di fasilitas ini adalah baik. Hanya dibutuhkan 9 pekerja sosial lagi setelah pemberitahuan ketersediaan. Panti asuhan kemudian melayani anak-anak terlantar dengan menyediakan berbagai jenis fasilitas dan sarana prasarana ⁸⁹ dan sumber daya yang tersedia untuk anak-anak terlantar yang tinggal di panti asuhan. Saya berusaha semaksimal mungkin. ⁴⁹ Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik scoring.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi observasional, dan studi dokumenter. Dalam metode pemilihan informan, kami menggunakan metode sampling dengan jumlah informan sebanyak lima orang. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi.

³⁷ Kedua, Sinabutar, A.M. Dan Setianingsih, E.L. Survei yang dilakukan oleh (2017). Judulnya “Masalah Sosial Kota Semarang, Pengawasan ⁶² Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kinerja program pengobatan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan saling terbuka antar organisasi terkait, bukan ego. ⁷⁴ Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan, peristiwa lokal dan ²¹ dokumen dari dinas sosial, pemuda dan olahraga kota Semarang digunakan

sebagai sumber data. ⁶⁹ Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putro, R. D., & Sutarto, J. (2015). Dengan judul “Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Dibalai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang “.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya Pembinaan PGOT ada beberapa tahap yaitu: pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah; perencanaan program pelayanan; pelaksanaan pelayanan; pasca pelayanan.

²² Kendala yang paling mendasar adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan talent yang belum memadai, dan faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama antar departemen yang mendukung proses coaching. Metode wawancara, metode pengumpulan data dengan ²⁴ observasi dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan teknik. Metode analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan ¹⁶ kesimpulan. Subyek survei ini adalah lima penerima manfaat, dua pelatih sebagai informan utama, dan kepala Balai sebagai informan tambahan.

Keempat, Falaq, Y., Rachman, M. , Dan Suyahmo, S. Survei yang dilakukan pada ⁶⁷ (2016). “Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban trafficking di Panti Sosial SunuNgesti Tomo Jepara. Hasil penelitian: 1) Timeline dan implementasi kasus pertama klien untuk melaksanakan program pelayanan rehabilitasi sosial. Lebih banyak pendamping roll. 2) Bentuk dan konsep pelayanan berupa pembinaan jasmani ¹¹ dan kesehatan melalui olahraga, pemeriksaan kesehatan berkala, bimbingan mental dan ceramah, bimbingan sosial

melalui terapi kelompok, dan konseling keterampilan. tercermin dalam perubahan perilaku korban, yang terwujud dalam bentuk interaksi sosial yang baik dan juga rehabilitasi dengan realisasi diri. Ada kepercayaan dan kepercayaan pada orang lain untuk klien, dan kepercayaan dalam perspektif teori konstruksi sosial, berarti kinerja rehabilitasi Kegiatan sosial yang dilakukan sepenuhnya diinternalisasikan oleh klien.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber data utamanya adalah peristiwa dari orang dalam (perdagangan dan korban anak pekerja sosial), dokumen yang relevan, dan observasi. Teknologi pengumpulan data dengan metode wawancara dengan pedoman wawancara, metode observasi dengan lembar observasi, metode dokumen dengan survei beberapa dokumen dari kesejahteraan sosial dan pusat rehabilitasi. Periksa keabsahan data Anda menggunakan sumber data, alat temu kembali data, dan metode triangulasi sumber teoritis. Teknik analisis data menggunakan versi jarak tempuh (akuisisi data, reduksi data, tampilan data, dan validasi data).

Kelima, Widyasari, I. Sebuah studi yang dilakukan oleh (2016). Judulnya “Analisis Penerapan Model Manajemen Pelayanan Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Anak Di Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRSR Yogyakarta tidak menerapkan model manajemen pelayanan tertentu. Studi menunjukkan bahwa BPRSR Yogyakarta cenderung mengadopsi model segitiga layanan ketika melaksanakan program rehabilitasi sosial untuk anak. Hambatan penerapan model manajemen pelayanan BPRSR Yogyakarta adalah hambatan

sumber daya manusia, konsultasi dan infrastruktur. Di sisi lain, penerapan model manajemen pelayanan di BPRSR Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya aturan dan prosedur yang baku, ketersediaan dana anggaran, dan adanya formulir pendukung. Survei ini merupakan survei kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik perolehan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan identifikasi informan, triangulasi sumber, dan sampling target untuk teknik validasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles Huberman.

16 2.2. Landasan Teori

7 2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan administrasi tercapai. Hal ini mengacu pada kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti yang direncanakan berdasarkan petunjuk yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Menurut Ockler, dikutip Handoko dalam (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10), ia menetapkan elemen kunci dari proses pengawasan: standar implementasi dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, dan fakta. Menjelaskan upaya sistematis untuk membuat perbandingan. -Aktivitas dunia terhadap standar yang diberikan.

Menurut Sarwoto (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10), pengawasan adalah kegiatan seorang administrator yang berusaha untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana atau hasil yang diinginkan yang ditetapkan oleh dana.

Manullang memberikan definisi, ⁷¹ suatu proses untuk memutuskan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Situmorang (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10), definisi sutradara adalah menguji bahwa semua rencana dibuat dengan instruksi yang digariskan, menemukan kelemahan dan kekurangan secara sekilas (Wisnu Arya Pamungkas, 2021:10). Untuk memperbaikinya dan mencegah kekambuhan.

Pengawasan adalah pemberian pengertian dan kesadaran kepada pihak yang diberi tugas agar dilakukan secara tepat dan akurat ³ dengan menggunakan ²³ berbagai sumber daya yang tersedia, dan segala kesalahan atau penyimpangan yang justru dapat mengakibatkan kerugian. Bagi lembaga atau organisasi yang terlibat (Makmur: 2011:176).

2.2.2. Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Makmur (2011: 176), ada tiga tipe direktur.

- A. Pemantauan awal (pengendalian kemudi). Kontrol ini dirancang ³ untuk mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target dan memperbaikinya sebelum aktivitas tertentu dilakukan.
- B. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (pengelolaan simultan). Pemantauan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jenis pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu memenuhi aspek-aspek tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan, atau merupakan semacam alat "pemeriksaan ganda" yang menjamin terdeteksinya suatu ³ pelaksanaan suatu kegiatan.
- C. Pemantauan umpan balik adalah pemantauan yang mengukur hasil dari suatu

kegiatan tertentu yang diselesaikan. Menurut Handyaningrat, pengawasan adalah proses dimana seorang pemimpin ingin mengetahui hasil dari suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, arah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

- D. Melihat dari tipetipe pengawasan tersebut maka pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat perlu dilakukan untuk menjadikan hasil akhirnya sesuai dengan keinginan bersama.

¹⁶ 2.2.3 Maksud dan Tujuan pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat yang dikutip Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12) yaitu:

- a. Pencegahan dan koreksi kesalahan, penyimpangan, pelanggaran pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang telah ditetapkan.
- b. Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang diberikan tercapai secara efisien dan berhasil.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handyaningrat yang dikutip Sopi dalam (Arya Wisnu Pratama, 2021:12) mengemukakan Definisi Pengawasan bahwa:

- ¹⁸a. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum.
- b. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran, menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran dalam pelaksanaan pekerjaan
- c. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.

d. Pengawasan harus didasarkan pada standar yang obyektif, menyeluruh dan akurat.

e. Pemantauan jalur terus menerus

f. Hasil pemantauan harus dapat memberikan umpan balik untuk implementasi, perencanaan, dan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

2.2.5 Rehabilitasi Sosial

2.2.5.1 Definisi rehabilitasi

Dilihat dari arti kata, ia berasal dari bahasa Inggris, rehabilitasi. Rehabilitasi berarti mendapatkan kembali kemampuan yang pernah Anda miliki karena Anda harus kehilangan kemampuan untuk menggunakan kemampuan yang hilang dalam bencana. Itu akan dikembalikan ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum bencana. Oleh karena itu, rehabilitasi sama dengan sebelumnya, repair (perbaikan/perbaikan), legal repair atas nama, pembaharuan.

Rehabilitasi sosial yang biasa disebut RESOS dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk pemulihan dan pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial, seperti: B. Meningkatkan rasa percaya diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial. Menurut Sri Yuni (2008:9), rehabilitasi sosial adalah “serangkaian spesialisasi yang ditujukan untuk memecahkan masalah, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial, serta menjalankan fungsi sosial yang sesuai. Ini adalah suatu “kegiatan”.

Seperti yang ditunjukkan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial (2006: 6), “Semua layanan dan rehabilitasi kesejahteraan ditujukan untuk mendapatkan

38 kembali kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Untuk membantu masyarakat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama dan sosial budaya serta berkeinginan untuk memperoleh kembali kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan baik”

5 b. Fungsi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial mempunyai fungsi dalam kegiatan yang dilaksanakannya. Fungsi-fungsi ini memainkan peran yang berguna dalam kegiatan rehabilitasi. Seperti yang diungkapkan Hanafi Dahlan (2008: 2122), rehabilitasi sosial memiliki fungsi utama.

- A. Pencegahan, yaitu pencegahan terjadinya masalah kesejahteraan, pencegahan 93 berkembangnya atau meluasnya masalah kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, dan pencegahan terulangnya masalah kesejahteraan yang terjadi pada individu, 5 keluarga, dan masyarakat.
- B. Sebagai rehabilitasi, suatu proses refungsionalisasi dan pembangunan yang memungkinkan penyandang masalah sosial dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- C. Pembangunan yang merupakan fungsi yang mencakup tiga ciri utama: meningkatkan tingkat kesejahteraan, menyebarkan 5 efek ganda pada lingkungan sosial keluarga dan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. ..

D. Dukungan, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, memiliki implikasi penting sebagai salah satu penentu keberhasilan program intra-sektoral dan inter-sektoral.

5 Departemen Sosial (2007: 35-36) juga mengungkapkan fungsi rehabilitasi sosial sebagai berikut:

a. Responsif/Tanggap darurat

Ini merupakan fungsi darurat pelayanan kesejahteraan anak bagi AMPK (anak berkebutuhan khusus) yang terjadi di sekitar panti asuhan. Fitur ini menjadikan organisasi sosial sebagai pihak pertama yang menyelamatkan anak-anak dengan memberikan bantuan darurat baik untuk alasan kesehatan maupun tempat penampungan sementara dan keadaan darurat lainnya.

b. Pencegahan / Pencegahan Fungsi preventif dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya kasus-kasus AMPK, mencegah berkembangnya kasus-kasus tersebut, dan menarik perhatian anak-anak yang sudah membutuhkan perlindungan khusus.

c. Perlindungan / perlindungan Fungsi perlindungan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang mungkin melarikan diri dari situasi yang memerlukan perlindungan khusus, dan memberikan perlindungan terhadap insiden yang mereka hadapi, baik sendiri di panti asuhan atau bekerja sama dengan pihak lain.

d. Rehabilitasi / Rehabilitasi

2.2.2 Anak Terlantar

a. Definisi anak terlantar menurut para ahli:

Menurut ³⁴Walter A. Friedlander (1982:45), anak terlantar memiliki kondisi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis, dengan dukungan ³⁴dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Anak yang tidak mendapat pengasuhan minimal dari orang tuanya karena ia membutuhkannya. . Sebagai sumber dukungan pengganti.

³⁴Menurut Howard Dubowitz (2000:10), anak terlantar dipahami sebagai bentuk kelalaian pengasuhan anak yang menimbulkan risiko bagi anak. Orang tua sebagai orang tua (parents of parent) tidak bertanggung jawab ³²untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pengabaian anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan orang tua, tetapi juga karena faktor lain seperti perceraian orang tua dan pekerjaan orang tua

¹⁰.Ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut :

- Laki -laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
- Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua
- Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
- Anak yang terlahirdari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

undang-undang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tidak. 27 Tahun

1984 memiliki beberapa ciri atau ciri anak terlantar.

1 Anak berusia 518 tahun (laki-laki/perempuan)

46
2 Tidak ada bapak karena meninggal (yatim), atau karena meninggal karena tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi secara ekonomi atau melanjutkan pendidikan dasar.
10

3 Orang tua sakit dan tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap. Penghasilan tidak tetap, sangat rendah dan tidak mampu membiayai pendidikan anak.

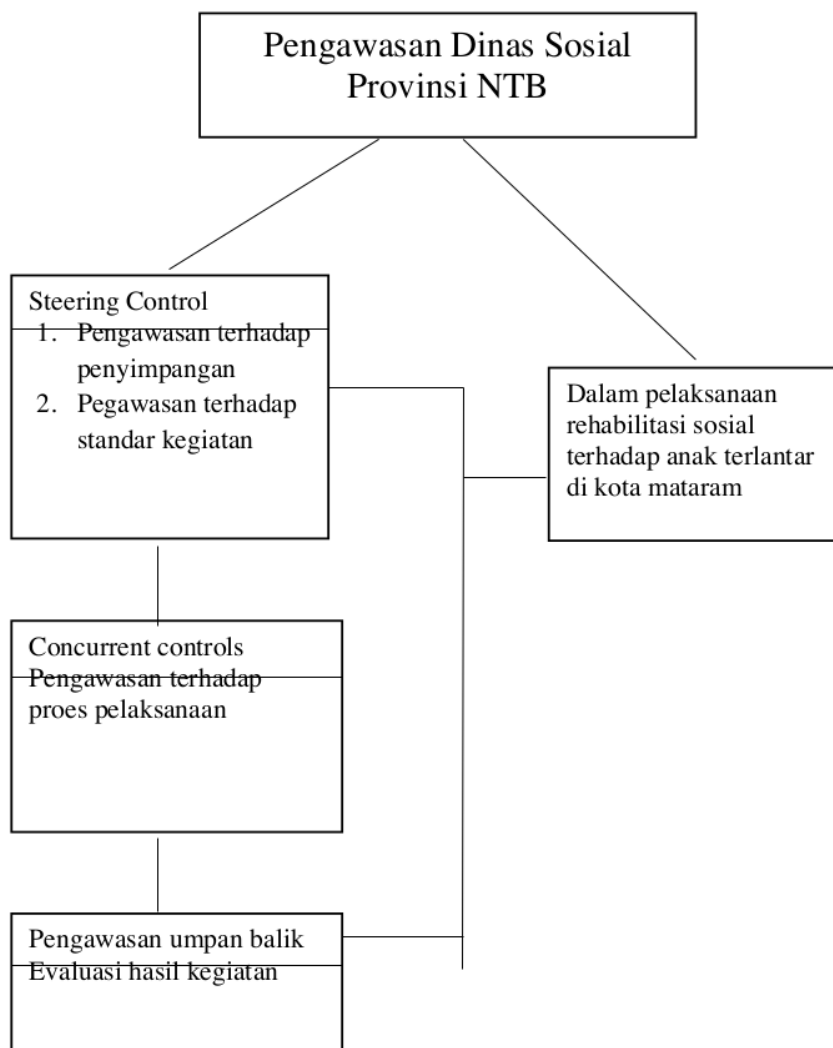
4 Orang tua yang tidak memiliki rumah tetap, baik rumah sendiri maupun rumah sewa.

5 Tidak ada ibu dan ayah (yatim) atau saudara kandung. Juga, tidak ada yang menjamin kelangsungan pendidikan di tingkat dasar kehidupan seorang anak.

6 Kebutuhan dasar tidak terpenuhi

7 Tidak ada anak yang lahir dari perkosaan yang mengasuhnya dan tidak dididik.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Makmur (2011:176)

2.3.1⁴⁴ Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan masalah variabel yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, dan sebenarnya membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Definisi konseptual ditetapkan dalam kaitannya dengan apa yang sedang dipelajari untuk memahami banyak teori yang ada dalam penelitian ini dan untuk memudahkan interpretasinya.

²⁵ Oleh karena itu, untuk memahami banyak teori yang ada dalam penelitian ini dan untuk memudahkan interpretasinya, peneliti³ menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Usulan tersebut antara lain dibahas secara cermat sebagai berikut:

Menurut Makmur (2011: 176), ada tiga tipe direktur.

A. Pemantauan awal (pengendalian kemudi). Kontrol ini dirancang³ untuk mengatasi masalah atau penyimpangan dari standar atau target dan memperbaikinya sebelum aktivitas tertentu dilakukan.

B. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (pengelolaan simultan). Pemantauan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jenis pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu memenuhi aspek-aspek tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan, atau merupakan semacam alat "pemeriksaan ganda" yang menjamin terdeteksinya suatu pelaksanaan suatu kegiatan.³

C. Pemantauan umpan balik adalah pemantauan yang mengukur hasil dari suatu kegiatan tertentu yang diselesaikan. Menurut Handyaningrat,

pengawasan adalah proses dimana seorang pemimpin ingin mengetahui hasil dari suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, arah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

3 2.3.2 Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah aspek-aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Adapun variable-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

Table 2.2 Definisi Oprasional

No	Variable	Indikator
1	Steering Control	1. Pengawasan terhadap penyimpangan 2. Pengawasan terhadap sandar kegiatan
2	Concurrent Control	Pengawasan terhadap proses pelaksanaan
3	Pengawasan Umpan Balik	Evaluasi hasil kegiatan

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif terutama untuk peneliti, untuk tujuan pengambilan sampel sumber data, dan untuk penelitian gaya bola salju, untuk menyelidiki keadaan objek alami (bukan eksperimen). Ini adalah penelitian post-positivis. metode yang digunakan untuk. Teknik analisis data triangulasi (gabungan), induktif, atau kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode survei deskriptif adalah model survei yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan survei karena data dikumpulkan dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan survei. Penelitian deskriptif juga menggunakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan gejala yang ada, yaitu keadaan gejala pada saat penelitian dilakukan

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah keluarnya surat izin penelitian dari pihak kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.3 Pemilihan Narasumber/Responden

Pengumpulan data survei dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan informan sebagai sumber data. Keputusan informan didasarkan pada metode sampling yang ditargetkan, yaitu metode pengambilan sampel yang

bertujuan untuk memperoleh data yang akurat oleh orang yang dipilih yang memahami subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:85), seorang informan tidak hanya dapat memberikan peneliti informasi tentang sesuatu, tetapi juga menunjukkan sumber-sumber yang mendukung bukti dan memberikan akses kepada sumber-sumber yang relevan. Adapun yang menjadi informan/narasumber dalam penelitian ini, antara lain:

Table 3.1

Narasumber

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	1 Orang
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
3	Kepala Seksi Anak Terantar	1 Orang
4	Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
5	Anak Terlantar	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber: diolah oleh peneliti

1.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh seorang peneliti atau subjek data. Data primer kadang-kadang disebut sebagai data primer. Pengumpulan sumber data kunci melalui wawancara dan observasi partisipan merupakan hasil upaya yang memadukan antara melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010: 3) .

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, jurnal penelitian, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, tergantung pada jenis dan klasifikasi sumbernya.

2.3.1 Teknik Observasi

Teknik penulisan karya ilmiah dengan mengamati secara langsung subjek penelitian, mencatat semua gejala yang ditemukan di lapangan, dan melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan bagi permasalahan peneliti, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi yang menjadi pedoman.

2.3.2 Teknik interview (wawancara)

Yaitu pedoman teknik penulisan karya ilmiah dengan cara wawancara mendalam untuk mendapat informasi yang lengkap dan mendalam dari informan.

Investigasi ini dilakukan dengan menanyakan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak-pihak terkait yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan penyidikan, komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan birokrasi.

2.3.3 Teknik Dokumentasi³

Metode dokumentasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat mendukung data primer. Metode dokumentasi dapat dilakukan pada perangkat⁸ berikut: pedoman dokumentasi merupakan merupakan alat pengumpulan data melalui dokumen-dokumen untuk memperoleh catata-catatan atau dokumen yang ada di lokasi peneliti atau sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian⁵⁶ kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, antar lapangan, dan setelah meninggalkan lapangan. Sebelum membahas berbagai teknik analisis data, Anda dapat menjelaskan terlebih dahulu pentingnya analisis data. Analisis data melibatkan pengorganisasian data dari wawancara, catatan, studi lapangan, dan dokumen ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesisnya, merakitnya menjadi pola, dan memilih apa yang penting dan dipelajari. Ini adalah proses kompilasi secara sistematis. Dan ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh saya dan orang lain Sugishirono (2014: 244).

Prinsip teknik analisis data adalah⁶³ mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul secara sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Miles dan Huberman (2014: 246253) dari Sugishirono mengemukakan bahwa⁴³ kegiatan

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data jenuh. Kegiatan analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin kompleks datanya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, melihat pokok-pokok pokok, memusatkan perhatian pada pokok-pokok pokok, dan mencari tema dan pola.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan sebagainya. Teks naratif adalah yang paling umum digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti dapat membantu dengan menyajikan data dalam format teks dan menyisipkan tabel atau gambar untuk memperjelas temuan.

c. Gambar Kesimpulan dan Verivasi

Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi seperti yang saya katakan, masalah dan masalah penelitian masih bersifat sementara dan berkembang tergantung pada bidang studi, Anda tidak harus menjawab. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau penjelasan objek yang sebelumnya gelap atau kabur, sehingga ketika terungkap setelah survei menjadi hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB) adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang berada di bagian Barat Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota provinsi ini berada di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kota Mataram. Pada tahun 2020, penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.320.092 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa/km². Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Selanjutnya, Kepulauan Sunda Kecil dibagi menjadi tiga negara bagian: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di negara bagian itu adalah Lombok di barat dan Sumbawa di timur. Sebagian besar penduduk Lombok adalah Sasak, dan Bima (Mbojo) dan Sumbawa adalah kelompok etnis terbesar di Sumbawa.

4.1.2. Kondisi Iklim

Menurut data statistik dari Meteorological Research Institute, suhu maksimum pada tahun 2001 adalah 30,9 ° C hingga 32,1 ° C, dan suhu minimum adalah 20,6 ° C hingga 24,5 ° C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan September dan suhu terendah terjadi pada bulan November. Kelembaban rata-rata NTB yang merupakan wilayah tropis relatif tinggi, berkisar antara 48 hingga 95%.

4.1.3 Kondisi Geografis

Ditinjau dari segi kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Nusa Tenggara Barat Menurut

Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / kota	Luas area km ²	Persentase
1	Lombok barat	1.053,92	5,23
2	Lombok tengah	1.208,40	6,00
3	Lombok timur	1.605,55	7,97
4	Sumbawa	6.643,98	32,97
5	Dompu	2.324,60	11,53
6	Bima	4.389,40	21,78
7	Sumbawa barat	1.849,02	9,17
8	Lombok utara	809,53	4,02
9	Kota mataram	61,30	0,30
10	Kota bima	207,50	1,03
	Total	20.153,20	100,00

Sumber :bappedaNTB

Berikut adalah batas Administrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali

53

4.1.4 Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat kondisi masyarakat yang berada di Nusa Tenggara Barat mayoritas beragama Islam, dan sisa nya ada yang beraga Hindu, Kristen, dan Budha. Berikut rincian datanya sebagai berikut:

7

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Persentase
1	Islam	96,80%
2	Kristen	0,44%
3	Hindu	2,44%
4	Buddha	0,32%

Sumber : Wikipedia.org

4.2 Profil Dinas Sosial Provinsi NTB

77

4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Provinsi NTB

Dinas Sosial Provinsi NTB awalnya bernama Dinas Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan yang diresmikan pada tanggal 8 Juli 2004 oleh Menteri Sosial RI H. Bachtiar Chamsyah, SE . Kemudian berubah menjadi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB, yang mengurus masalah sosial dan

58

kependudukan dan catatan sipil. Pada Tahun 2016 nama Dinas berubah menjadi Dinas Sosial Prov. NTB atas dasar ²⁸ Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

²⁰ Dinas Sosial Prov. NTB terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi Sub-bagian Program, Sub-bagian Umum, dan Sub-bagian Keuangan. Selain itu Dinas Sosial Prov. NTB memiliki 4 Bagian yaitu Bagian ³² Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Bidang Pemberdayaan Sosial (Rehsos), Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Dinas Sosial Prov. NTB memiliki 236 pegawai termasuk pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah. Terdapat 8 panti yang dibawah oleh Kementerian Sosial NTB, yaitu : panti sosial “Mira Adi” untuk pekerja wanita, panti sosial “Karya Mandiri” untuk pembinaan pemuda, panti sosial “Generasi Harapan” untuk pengasuhan anak, “ Mandarica “Rumah sosial untuk orang tua,” Sasambo Matupa “ Rumah Perlindungan Anak dan Permukiman Sosial, Panty Social Binaka Riya" Madani ", Panty Social Langutusia" Mesiangi ", Panty Social Binararas "Muhmainna".

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Prov. NTB adalah Penerbitan Izin Operasional Pendirian ⁵⁷ organisasi Sosial, Penerbitan Izin Orang Tua Angkat, Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan, Penerbitan Izin Pengumpulan Uang dan Barang, dan yang terakhir Penerbitan Izin Undian Gratis.

7

4.2.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Provinsi NTB

1. Visi

48

Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang

2. Misi

- a. NTB Tangguh dan Mantap Dengan kesiapsiagaan bencana dan pembangunan infrastruktur serta penguatan konektivitas wilayah
- b. NTB Clean And Serve Dengan mentransformasikan birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN, dan engagement.
- c. NTB Sehat Dan Cerdas Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. NTB Asri Dan Lestari
Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkemajuan.
- d. NTB Sejahtera Dan Mandiri
Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi
- e. NTB Aman Dan Berkah
Melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

17

4.2.3 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB

19

1. Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi NTB

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan menetapkan rencana kerja strategis tahunan untuk kesejahteraan sosial NTB.
- b. Membuat materi pembelajaran tentang analisis kerja, evaluasi kerja, standar kerja, dan keterampilan kerja melalui hasil analisis kerja
- c. Pelaksanaan peraturan, petunjuk teknis, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik di pusat maupun di daerah
- d. Mengembangkan dan menetapkan instruksi dan arahan pelaksanaan dalam kaitannya dengan misi kesejahteraan sosial negara
- e. Mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan kesejahteraan sosial
- f. Meringkas bahan penelitian terstruktur di bidang institusi, struktur organisasi, departemen dan analisis personalia
- 19 g. Merumuskan bahan kajian penataan di bidang kelembagaan, struktur organisasi serta analisis jabatan dan kepegawaian.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB

18 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Dinas Sosial Provinsi NTB mempunyai fungsi sebagai berikut :

-
- a. Membuat materi kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, dan koordinasi program
-

- b. Penyusunan materi pembelajaran, analisis tempat kerja, evaluasi tempat kerja, dan analisis beban kerja
- c. Merencanakan program kesejahteraan sosial dan program kegiatan untuk memberdayakan masyarakat adat di daerah terpencil yang miskin
- d. Pengelolaan dan koordinasi program kesejahteraan dan rehabilitasi sosial
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan program-program penguatan kelembagaan sosial dan bencana
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial NTB dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah UPTD
- g. Pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial

4.2.4. Moto Dan Jenis Pelayanan

1. Moto :

Melayani Dengan Hati.

2. Jenis Pelayanan

- a. Penerbitan izin operasional pendirian organisasi sosial.
- b. Penerbitan izin orang tua asuh
- c. Penerbitan izin untuk memungut biaya
- d. Penerbitan izin untuk mengumpulkan uang dan barang
- e. Penerbitan izin undian gratis

4.2.5 Rincian Tugas

1. Kepala

Tugas di bidang dokumentasi kebijakan teknis, ² perencanaan program, masalah keuangan dan kegiatan untuk mengelola operasi dan layanan pemerintah, ² perlindungan dan keamanan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pengelolaan masyarakat miskin, dan ketenagakerjaan, manajemen pelaksanaan dan data evaluasi.

2. Sekretaris Dinas

Kepegawaian organisasi dan manajemen kesekretariatan, layanan manajemen umum, manajemen komunikasi, arsip, staf, peralatan, remitansi untuk layanan kesejahteraan sosial.

² **3. Sub Bagian Program**

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, serta evaluasi dan pelaporan program.

4. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.

² **5. Sub Bagian Umum**

Dalam kontrol departemen, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kontrol anggaran, dan implementasi protokol.

² **6. Sub Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, anatara lain sebagai berikut :

a. ² Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan planning acara & kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, penilaian & pelaporan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

b. ² Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Menyiapkan bahan pengambilan kebijakan, penyusunan program dan perencanaan aksi, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

c. ² Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, menyusun program dan kegiatan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga.

7. Bidang Pemberdayaan dan ² Kelembagaan Sosial.

Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial.

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan.

Di bidang pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat dan lembaga sosial, menyiapkan bahan untuk pengambilan ² kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.

2

Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Uang dan Bantuan Sosial menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial.

2

Bagian keahlawanan dan penyuluhan sosial menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2

8. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Penyiapan bahan pembuatan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bagian rehabilitasi sosial dan pencegahan penyalahgunaan zat penyandang disabilitas.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang

Materi disiapkan untuk pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bagian Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas sosial dan korban perdagangan orang.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

92

Departemen Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

9. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin.

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Menyiapkan bahan pembuatan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan pada bagian Penanggulangan Miskin Perkotaan.

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan

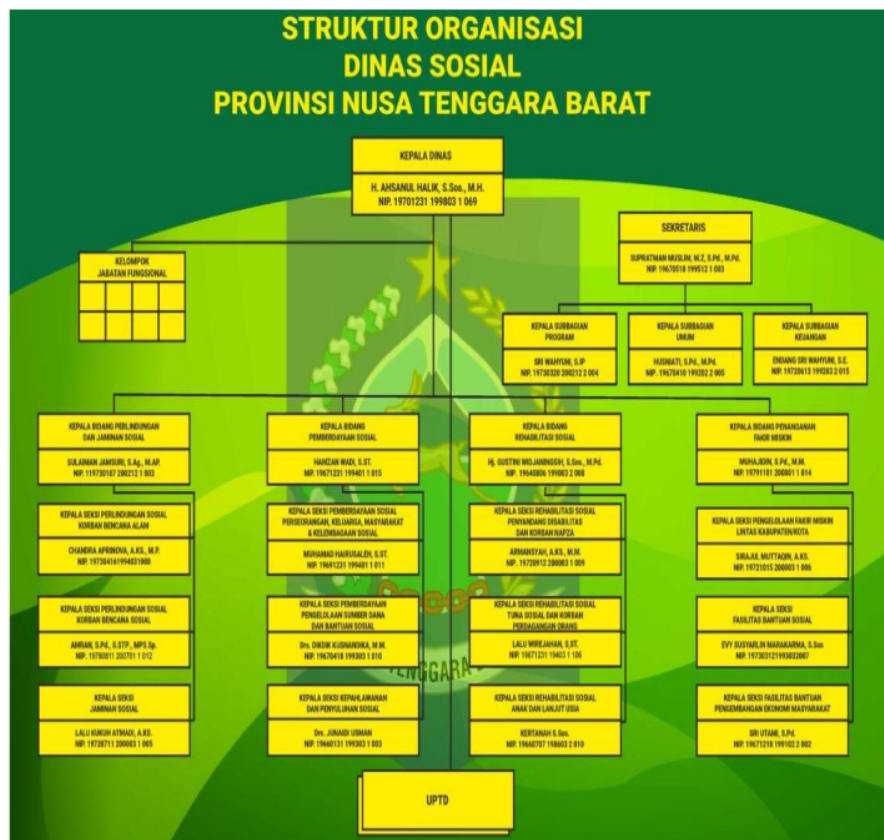
Menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, persiapan program dan perencanaan tindakan, bimbingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sektor penyalahgunaan lokal.

c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada bagian menangani orang miskin di negara-negara pesisir dan pulau-pulau kecil, menyiapkan bahan untuk pembuatan kebijakan, persiapan program dan perencanaan tindakan, bimbingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4.2.6 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi NTB



Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1. Pengawasan Pendahuluan (steering controls).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan tertentu dilakukan. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi NTB melakukan pengawasan atau steering controls dengan tujuan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak terlantar dengan tujuan mereka memiliki kesempatan hidup yang sama dengan anak-anak lainnya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Lanang Mohammad Saleh, SE. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa :

“Sebelumnya kami jelaskan yang dimaksud anak terlantar disini bukan anak jalanan, sebab di kota mataram pada tahun 2020 menurut data dinas sosial kota mataram sudah tidak ada lagi anak jalanan di wilayah kota mataram, namun yang ada anak yang bekerja atau di pekerjaan di jalan tepatnya di perempatan jalan di tempat wisata dll. mereka masih memiliki tempat tinggal dan tidak hidup di jalanan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi terkait anak terlantar baik di kota mataram maupun di kabupaten/kota lain di wilayah provinsi ntb adalah sebatas pengawasan anak terlantar yang ada di dalam panti asuhan atau sekarang lebih dikenal dengan lembaga kesejahteraan sosial anak (lkسا) yang mengasuh anak terlantar di dalam panti maupun dalam asuhan keluarga. jadi yang diawasi adalah lembaga pengasuhnya, terkait bagaimana sarana dan prasarana dalam panti , bagaimana sistem pendidikan untuk anak asuhnya, serta bagaimana kebutuhan dasar anak asuhnya. dengan tetap berkoordinasi dengan pendamping rehabilitasi sosial anak di kota mataram serta bidang rehabilitasi sosial pada dinas sosial kota mataram Sedangkan untuk pengawasan anak terlantar yang di temukan di jalan atau anak jalanan atau anak (bayi) yang di terlantarkan atau di buang di jalan ,

2 kami dari dinas sosial provinsi ntb pasti dan selalu berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten/kota di Provinsi NTB” (sumber: wawancara tanggal 14 Januari 2022)

17 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan anak terlantar bukanlah anak yang berada di pinggir jalan maupun di jalanan, melainkan 85 mereka anak-anak yang berada di panti asuhan atau lembaga sosial pengasuh anak lainnya. 7 Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB dalam melakukan pengawasan terhadap anak terlantar tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak dengan harapan anak-anak tersebut dapat memiliki kehidupan yang layak. Berikut jumlah anak terlantar yang telah diberikan pengawasan atau telah berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Provinsi NTB :

Gambar 4.2 Jumlah Panti Sosial Anak / Lksa Beserta Jumlah Anak Terlantar Yang Terdata Di Nusa Tenggara Barat Per Kabupaten / Kota Tahun 2020

KAB/KOTA	Total LKSA	Total Anak	Total Anak LKSA	Total Anak Keluarga
BIMA	48	1112	467	645
DOMPU	31	730	134	596
KOTA BIMA	28	653	43	610
KOTA MATARAM	15	601	468	133
LOMBOK BARAT	58	1314	778	536
LOMBOK TENGAH	98	2199	1325	874
LOMBOK TIMUR	149	5280	2312	2968
LOMBOK UTARA	8	369	182	187
SUMBAWA	1	37	25	12
SUMBAWA BARAT	6	75	6	69

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak terlantar terbanyak pada Kabupaten Lombok Timur yaitu 5280 jiwa.

Kesejahteraan Sosial Negara NTB Upaya Memberikan Kesejahteraan Sosial Pada Anak Terlantar Dinas Sosial Provinsi NTB memiliki program kesejahteraan sosial yang jelas dalam upaya menangani anak terlantar. Program layanan sosial untuk anak terlantar dapat dibagi menjadi dua bentuk: layanan kelembagaan dan layanan masyarakat. Layanan kelembagaan dilakukan oleh lembaga yang berbeda berdasarkan visi dan misinya. Instansi terkait antara lain organisasi sosial/LSM/yayasan, perusahaan (sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam dunia usaha), dan organisasi atau lembaga yang bersifat keagamaan, pendidikan, atau sosial. Pengabdian kepada masyarakat kini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan juga dapat dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai penyelenggara bakti sosial masyarakat. Program kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, baik dalam bentuk bakti kelembagaan maupun pengabdian masyarakat, dilaksanakan oleh kesejahteraan sosial dengan mengalihdayakan anak terlantar ke LKSA.

LKSA adalah lembaga yang bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial untuk memantau anak-anak, termasuk anak terlantar. LKSA menerima data tentang anak terlantar dari layanan kesejahteraan sosial dan memberikan layanan kepada anak terlantar. Layanan yang diberikan oleh LKSA adalah layanan

kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di dalam dan di luar panti asuhan (pengabdian masyarakat).

1 Dimana pelayanan sosial anak terlantar dalam panti merupakan pelayanan kelembagaan dan pelayanan luar panti merupakan pelayanan dari masyarakat.

a. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Panti Asuhan Kesejahteraan sosial panti asuhan adalah pola kesejahteraan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan atas dasar fasilitas/kerja, dimana klien bekerja/bekerja di luar rumah dengan melibatkan masyarakat sekitar yang dapat melakukannya. 14 Panti Asuhan sebagai suatu sistem sosial merupakan salah satu jawaban atas permasalahan anak terlantar. Di panti asuhan, anak-anak dapat memperoleh kembali dunia mereka melalui program yang terorganisir. Anak-anak juga diberikan akses pendidikan yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, mereka diajarkan tentang agama di panti asuhan dan dapat meningkatkan perilaku dan kebiasaan mereka dengan memberi mereka pengetahuan agama. Kehadiran pelayanan di panti asuhan dapat 1 sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak terlantar. Kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di panti asuhan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum Pemenuhan hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

2) Tujuan Khusus Memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, perlindungan, kesetaraan, spiritual dan emosional. Kesempatan untuk mewujudkan rasa aman 1 dan berpartisipasi dalam kesejahteraan sosial dan proses kehidupan masyarakat.

Kemampuan anak untuk menciptakan kondisi sosial dan menghindari perilaku sosial yang menyimpang.

Misalnya, layanan LKSA di panti asuhan memberikan sandang, papan, pendidikan sekolah atau agama, kesempatan bermain dan berteman, dan kesempatan kembali ke sekolah untuk belajar dan mengembangkan bakat anak¹ terlantar. Yaitu pencegahan, perlindungan, pelayanan, dan sosialisasi. Berdasarkan cakupan programnya, rincian kesejahteraan sosial bagi anak terlantar adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Jasmani dan Kesehatan¹ Pelayanan Jasmani dan Kesehatan adalah proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan anak agar dapat berperan sosial. Kegiatan ini dapat dicapai dengan pemberian⁶⁸ makanan, pakaian, kegiatan olahraga, obat-obatan, dan rujukan pustulosis/rumah sakit yang memenuhi standar gizi. Kegiatan ini dilakukan oleh perawat yang memiliki keterampilan di bidangnya. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Jiwa Pemerintah Sulawesi Selatan
 2. Pelayanan Kesehatan¹ Mental Spiritual dan Mental Pelayanan kesehatan mental spiritual dan mental adalah pelayanan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai agama yang dianut dan keyakinan Tobe dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan umat beragamalah yang dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan cara demikian. Misalnya, mengajari anak mengaji dan berdoa. Kegiatan ini dilakukan oleh staf panti asuhan atau non panti asuhan⁷⁵ yang memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
-

3. ¹ Pelayanan sosial Pelayanan Sosial yakni proses pelayanan yang ditujukan kepada anak agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh pelayanan sosial ini yaitu memberikan peluang bagi anak-anak untuk bermain. Bermain sangat penting bagi mental, emosional dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, bermain tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial.
4. ¹ Konseling Kualifikasi Konseling Kualifikasi adalah suatu proses pelayanan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam bidang kegiatan ekonomi produktif. Bimbingan keterampilan tidak hanya mengisi waktu luang ¹ sesuai dengan bakat dan kemampuan anak, tetapi juga memberikan keterampilan praktis untuk mempersiapkan anak memasuki dunia kerja dan usahanya saat meninggalkan panti asuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan ⁸³ di panti asuhan atau di luar panti asuhan, tergantung disiplinnya. ¹ Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak

4.3.1.1. Pengawasan Terhadap Penyimpangan

⁵¹ Pengawasan Terhadap Penyimpangan merupakan konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Dengan kata lain, sesuatu dianggap sebagai masalah sosial karena mempengaruhi hubungan dengan nilai-nilai dan mengganggu tujuan hidup orang.

Menurut pendapat seseorang yang menetap di panti asuhan bernama Zaenul mengatakan bahwa:

“beberapa hari yang lalu terdapat seseorang anak panti yang melarikan diri dari panti dengan alasan tidak nyaman terhadap susana dan

lingkungan sekitar panti ini” (sumber: wawancara pada tanggal 24 Januari 2022)

Menurut pendapat kepala panti Ust. Maman atas peristiwa terjadinya kasus anak yang keluar dari panti secara tiba-tiba mengatakan bahwa:

“kami dari pihak panti tidak lepas tanggung jawab terhadap seseorang yang melarikan diri dari panti begitu saja, yang kami lakukan pertama kali dengan cara menghubungi sanak saudara jika tidak ditemukan keberadaan anak tersebut maka kami akan melakukan pencarian dengan dibantu beberapa aparat kepolisian”. (sumber: wawancara pada tanggal 24 Januari 2022)

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa pihak panti asuhan tidak serta merta lepas tanggung jawab atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anak terlantar, bahkan dari pihak mereka tetap mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut.

4.3.1.2. Pengawasan Terhadap Standar Kegiatan

Pengawasan terhadap standar kegiatan, yaitu pemantauan yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan. Pemantauan ³⁶ ini sering disebut sebagai monitor "ya-tidak", kontrol penyaringan, atau "berhenti-terus" yang ¹⁷ dilakukan selama aktivitas. Pemantauan ini merupakan proses di mana aspek-aspek tertentu dari prosedur harus terlebih dahulu disetujui atau kondisi tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan untuk memastikan keakuratan kinerja kegiatan.

Menurut pendapat Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bernama Hj. Gustini Widijaningsih, S.Sos., M.Pd. mengatakan bahwa:

“Prosedur standar dalam pengawasan terhadap anak terlantar pada dinas sosial provinsi NTB berkaitan dengan standar prosedur yang dimiliki oleh dinas sosial kota mataram yaitu koordinasi terkait rujukan, rekomendasi rujukan anak terlantar jika anak terlantar yang ditemukan berdomisili di kabupaten/kota diluar kota mataram. Sedangkan prosedur untuk penanganan anak (bayi) terlantar yaitu berdasarkan standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementrian sosial sebagaimana dapat dilihat dalam gambar prosedur penyerahan anak terlantar” (sumber: wawancara pada tanggal 16 Januari 2022)

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur penyerahan anak terlantar ³¹ sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku pada ¹ Dinas Sosial Provinsi NTB dan Dinas Sosial Kota Mataram.

Gambar 4.3 Prosedur Penyerahan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB

Pengawasan Terhadap Standar Kegiatan dalam Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksana/Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akseibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan sosial

dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

4.3.2 *Concurrent Controls*

¹⁶ *Concurrent Controls* merupakan Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jenis pemantauan ini adalah suatu proses yang perlu memenuhi aspek-aspek tertentu sebelum melanjutkan suatu kegiatan, atau semacam alat "pemeriksaan ganda" yang menjamin terdeteksinya suatu pelaksanaan suatu kegiatan.

⁵⁴ Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yaitu H. Ahsanul Khalik S.Sos., M.H. mengatakan bahwa:

“Terhadap perilaku anak yang cenderung untuk hidup di jalanan karena faktor ekonomi atau ditelantarkan oleh orangtuanya sehingga terpaksa untuk hidup di jalanan, maka kami dari dinas sosial provinsi NTB juga menyediakan rumah perlindungan yang dikenal dengan rumah perlindungan trauma center (RPTC) yang disediakan sebagai rumah singgah, rumah aman, rumah perlindungan sementara untuk anak atau orang yang memerlukan perlindungan akibat tindak kekerasan atau orang terlantar, di RPTC selain menyediakan tempat singgah sementara juga di penuhi kebutuhan akan makan dan minum, namun itu hanya bersifat sementara sampai kalian mendapat rujukan pemulangan ke keluarga atau ke ⁸⁶ panti sosial milik pemerintah atau panti sosial milik masyarakat”

12
Berdasarkan hasil wawancara terhadap anak terlantar yang berada di salah satu panti asuhan di kota mataram Bernama Jumawal mengatakan bahwa:

“menetap di panti asuhan ini selain Pendidikan yang diberikan secara baik, juga kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi” (sumber: wawancara tanggal 24 Januari 2022)

46
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar yang menetap di panti asuhan cukup terjamin baik dari segi Pendidikan maupun dari segi kebutuhan sehari-hari. Ini menandakan bahwa di panti asuhan ini sangat memprioritaskan kebutuhan anak-anak agar mereka merasa nyaman dan aman.

4.3.2.1 Pengawasan Terhadap Proses Pelaksanaan

25
Pengawasan terhadap proses pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut pendapat seorang informan bernama Armansyah, A.Ks., MM. mengatakan:

“Dinas sosial provinsi NTB juga melaksanakan rehabilitasi sosial termasuk di kota mataram yaitu berupa pemberian bantuan sosial kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti, dan peran dinas sosial kota mataram adalah memberikan rekomendasi pada LKSA/panti asuhan anak di wilayah kota mataram kepada dinas sosial provinsi NTB untuk mendapatkan bantuan sosial dimaksud” (sumber: wawancara tanggal 17 Januari 2022)

Hal ini menandakan bahwa Dinas Sosial Provinsi NTB selalu melaksanakan Rehabilitasi kepada anak terlantar di Kota Mataram. Dinas sosial juga berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan bantuan-bantuan atau arahan panti asuhan mana saja yang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

4.3.3. Pengawasan Umpan Balik

4.3.4. Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram

Penanganan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar di kota mataram tersebut dilakukan dengan dua pendekatan yaitu ada yang di dalam panti dan di luar panti. Namun pada saat ini lebih di utamakan pada dalam panti salah satunya pada panti asuhan milik pemerintas daerah yaitu salah satunya merupakan panti sosial nurul Jannah yang berada di ampenan .

Menurut pendapat seseorang Pekerja Sosial bernama Arif mengatakan bahwa:

“dalam rehabilitasi anak terlantar panti sosial sendiri memiliki cara agar memulihkan kembali rasa percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.” (sumber: wawancara pada tanggal 31 Januari 2022)

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar di kota mataram bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri serta tanggung jawab terhadap masa depan dirinya, keluarga maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesejahteraan anak terlantar

dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Ada 10 kriteria hak dasar anak, yaitu:

1. Hak untuk bermain,
 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan,
 4. Hak untuk mendapatkan pengakuan,
 5. Hak untuk mendapatkan status,
 6. Hak untuk mendapatkan makanan,
 7. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
 8. Hak untuk berkreasi,
 9. Hak kesamaan, dan
 10. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan
-

BAB V

36

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab 4 tersebut dapat di jelaskan bahwa :

1. Munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis.
2. Dinas Sosial Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain seperti melakukan pendataan terhadap anak terlantar, dan memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA atau panti asuhan.

59

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan saran

1. kepada dinas sosial provinsi ntb tersebut guna untuk mengembangkan kinerja dan kapasitas yang ada di sana. Terlebih kepada dinas sosial perlu meningkatkan program dan pelayanan serta tetap bertanggung jawab, konsisten, terhadap pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar
2. kepada keluarga anak terlantar diharapkan lebih menyadari hak dasar yang harus terpenuhi dengancara mencari informasi tyang bermanfaat untuk anak sekarang dan masa depannya.

PENGAWASAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTB DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA MATARAM TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT

47%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet	570 words — 6%
2	sosial.ntbprov.go.id Internet	435 words — 5%
3	repository.ummat.ac.id Internet	318 words — 4%
4	eprints.umm.ac.id Internet	259 words — 3%
5	eprints.uny.ac.id Internet	177 words — 2%
6	id.wikipedia.org Internet	126 words — 1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet	108 words — 1%
8	repositori.usu.ac.id Internet	106 words — 1%
9	digilib.uns.ac.id Internet	104 words — 1%

10	kurniawan-ramsen.blogspot.com Internet	103 words — 1%
11	garuda.ristekdikti.go.id Internet	93 words — 1%
12	eprints.unram.ac.id Internet	91 words — 1%
13	bpbd.ntbprov.go.id Internet	73 words — 1%
14	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet	72 words — 1%
15	disnakertrans.ntbprov.go.id Internet	69 words — 1%
16	123dok.com Internet	66 words — 1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet	58 words — 1%
18	repository.ub.ac.id Internet	58 words — 1%
19	es.scribd.com Internet	56 words — 1%
20	jdih.ntbprov.go.id Internet	50 words — 1%
21	www.scribd.com Internet	50 words — 1%

22	docplayer.info Internet	45 words — < 1%
23	ejournal.unsrat.ac.id Internet	45 words — < 1%
24	journal.unnes.ac.id Internet	42 words — < 1%
25	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	38 words — < 1%
26	digilib.uinsby.ac.id Internet	37 words — < 1%
27	www.jogloabang.com Internet	37 words — < 1%
28	disperin.ntbprov.go.id Internet	36 words — < 1%
29	mafiadoc.com Internet	35 words — < 1%
30	digilib.uin-suka.ac.id Internet	34 words — < 1%
31	lib.unnes.ac.id Internet	33 words — < 1%
32	repositori.umsu.ac.id Internet	33 words — < 1%
33	admin.ebimta.com Internet	32 words — < 1%

34	Internet	31 words — < 1 %
35	online-hukum.blogspot.com Internet	31 words — < 1 %
36	adoc.pub Internet	30 words — < 1 %
37	Rini Hariani Ratih. "Pengetahuan dan Sikap Ibu Nifas tentang Perawatan Luka Perineum", Jurnal Kesmas Asclepius, 2020 Crossref	27 words — < 1 %
38	journal.fh.unsri.ac.id Internet	24 words — < 1 %
39	Repository.umy.ac.id Internet	23 words — < 1 %
40	id.123dok.com Internet	23 words — < 1 %
41	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet	21 words — < 1 %
42	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	18 words — < 1 %
43	repository.iainkudus.ac.id Internet	18 words — < 1 %
44	repository.upstegal.ac.id Internet	18 words — < 1 %
45	adoc.tips Internet	17 words — < 1 %

46	eprints.walisongo.ac.id Internet	17 words — < 1 %
47	ml.scribd.com Internet	17 words — < 1 %
48	ppid.lomboktengahkab.go.id Internet	17 words — < 1 %
49	digilib2.unisayogya.ac.id Internet	15 words — < 1 %
50	pt.scribd.com Internet	15 words — < 1 %
51	www.kompasiana.com Internet	15 words — < 1 %
52	rajabandar.wg.ugm.ac.id Internet	14 words — < 1 %
53	repository.unim.ac.id Internet	14 words — < 1 %
54	www.suarantb.com Internet	13 words — < 1 %
55	Admin Admin, Muyasaroh Muyasaroh. "PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN PAI MELALUI METODE GUIDED DISCOVERY LEARNING", TAMADDUN, 2017 Crossref	12 words — < 1 %
56	repo.uinsatu.ac.id Internet	12 words — < 1 %
57	sipp.menpan.go.id	

12 words — < 1%

58 zainahajja.blogspot.com
Internet

12 words — < 1%

59 docobook.com
Internet

11 words — < 1%

60 e-journal.uajy.ac.id
Internet

11 words — < 1%

61 orpegbag.bojolali.go.id
Internet

11 words — < 1%

62 repository.fisip-untirta.ac.id
Internet

11 words — < 1%

63 repository.umj.ac.id
Internet

11 words — < 1%

64 repository.upi.edu
Internet

11 words — < 1%

65 Leni Trisnawati, Muliha Halim, Rizal Ekonomi.
"Kajian Model Konversi Lahan Persawahan Di
Desa Lantowonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana",
Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2020
Crossref

10 words — < 1%

66 jdih.kalselprov.go.id
Internet

10 words — < 1%

67 uad.portalgaruda.org
Internet

10 words — < 1%

68 digilib.unhas.ac.id
Internet

9 words — < 1%

69 digilib.unila.ac.id
Internet

9 words — < 1%

70 fr.scribd.com
Internet

9 words — < 1%

71 journal.univpancasila.ac.id
Internet

9 words — < 1%

72 repository.ar-raniry.ac.id
Internet

9 words — < 1%

73 zombiedoc.com
Internet

9 words — < 1%

74 Tony Pathony, Kusman Yuhana, Iwan Henri
Kusnadi. "EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BLANAKAN)", The World of
Business Administration Journal, 2020
Crossref

8 words — < 1%

75 abevoller.blogspot.com
Internet

8 words — < 1%

76 asepsulaemantea.wordpress.com
Internet

8 words — < 1%

77 bappeda.ntbprov.go.id
Internet

8 words — < 1%

78 data.ntbprov.go.id
Internet

8 words — < 1%

79	ejournal.kemsos.go.id Internet	8 words — < 1%
80	ilmupendidikansekolah.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
81	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	8 words — < 1%
82	media.neliti.com Internet	8 words — < 1%
83	qdoc.tips Internet	8 words — < 1%
84	repository.uinbanten.ac.id Internet	8 words — < 1%
85	repository.uinsu.ac.id Internet	8 words — < 1%
86	repository.unpas.ac.id Internet	8 words — < 1%
87	repository.usd.ac.id Internet	8 words — < 1%
88	www.hukumonline.com Internet	8 words — < 1%
89	www.suara.com Internet	8 words — < 1%
90	jurnal.untad.ac.id Internet	7 words — < 1%

91	Internet	7 words — < 1%
92	online-journal.unja.ac.id Internet	7 words — < 1%
93	text-id.123dok.com Internet	7 words — < 1%
94	Muhamad Syafiq Rofi. "Strategi Pemasaran Produk Mudharabah di BMT Mitra Ummat Al-Amanah Kecamatan Sirampog, Brebes", Jurnal Abdidas, 2020 Crossref	6 words — < 1%
95	afidburhanuddin.wordpress.com Internet	6 words — < 1%
96	idoc.pub Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF